

Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pada Kantor Wali Kota Medan

¹Arieffan Syah, ²Aldi Raihan Ramadhan Daulay, ³Muhammad Qomaruz Zaman

^{1,2,3}Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

Email : 1arieffansyah20@gmail.com, 2aldidolay30@gmail.com,
3mqomaruzzaman25@gmail.com

Corresponding Mail Author: arieffansyah20@gmail.com

Abstract : By comparing the budget with the realization and using it as a basis for determining accountability, budget evaluation is a process used to track deviations from the budget plan. The Medan Mayor's office has an accountability problem that hinders its effectiveness: it does not issue financial reports or income and expenditure realization reports. Given the issues raised in this research, the aim of this research is to ascertain how budget evaluation affects accountability. The 32 respondents who work in the Medan mayor's office were given a questionnaire as part of the method used in this study. The research results show that accountability is influenced by budget evaluation, and the impact is very positive.

Keywords: Evaluation, Budget, Accountability.

I. Pendahuluan

Anggaran yang tidak efektif yang tidak memberikan penekanan kuat pada akuntabilitas dapat menggagalkan rencana yang telah dibuat. Ukuran akuntabilitas berkelanjutan akan memberikan umpan balik, memungkinkan keberhasilan inisiatif mendatang untuk perbaikan berkelanjutan.

Anggaran berbasis akuntabilitas diharapkan akan memungkinkan penggunaan dana yang lebih efisien untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan publik, serta lebih transparan dalam pengelolaan sektor. Penganggaran berbasis akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas alokasi dan penggunaan sumber daya sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penganggaran berbasis akuntabilitas menekankan penggunaan anggaran untuk menegakkan prinsip nilai uang dan meningkatkan akuntabilitas organisasi (Beny Arifin W, 2012).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah dimana anggota masyarakat saat ini menekankan pentingnya akuntabilitas pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas organisasi pemerintahan yang operasionalnya sebagian besar ditopang oleh dana publik. Tinjauan anggaran berdampak pada bagaimana pejabat pemerintah bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika membuat anggaran selalu mengevaluasi kegiatan yang direncanakan tetapi tidak mengevaluasi kegiatan yang benar-benar dilaksanakan, sehingga menghasilkan kinerja di bawah standar. Minimnya publikasi laporan keuangan serta laporan realisasi pendapatan dan belanja menjadi penyebab belum berhasilnya sistem akuntabilitas di lingkungan Kantor Walikota Medan. Bertanggung

jawab sebagai badan yang bertugas menggunakan dan mengelola sumber daya daerah adalah mengapa akuntabilitas pemerintah daerah sangat penting.

II. Landasan Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas, yang mensyaratkan pemerintah daerah untuk bertindak demi kepentingan publik ketika mengambil keputusan, dalam hal ini terkait dengan penyediaan layanan publik, merupakan salah satu prinsip mendasar dari pemerintahan yang efektif. Pemberi amanah (agent) berkewajiban kepada pemberi amanah (principal), yang mempunyai hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut, untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang dilakukannya. bertanggung jawab.

Tujuan Akuntabilitas

Menumbuhkan kepercayaan publik adalah tujuan akuntabilitas. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi dapat mendorong partisipasi yang lebih besar dalam tata kelola, yang kemudian dipandang sebagai katalis perubahan masyarakat. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk mendorong tumbuhnya akuntabilitas politik sebagai syarat yang diperlukan untuk membangun pemerintahan yang dapat dipercaya dan efisien. Pejabat pemerintah harus memahami bahwa publik pada akhirnya bertanggung jawab atas hasil pekerjaan mereka. Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan tersebut serta kinerja pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas juga termasuk dalam tujuan akuntabilitas.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Semakin tinggi kualitas teknologi yang digunakan, termasuk alat dan proses yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang disediakan oleh organisasi, semakin akuntabel organisasi tersebut.

Penggunaan input atau bahan berkualitas tinggi oleh organisasi. Kondisi lingkungan fisik yang meliputi kebersihan, penataan ruangan, dan keselamatan kerja. Budaya organisasi dapat dilihat dari proses penganggaran dan penerapannya. Upaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi anggota organisasi agar bekerja menuju standar dan tujuan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia, yang meliputi aspek penggajian, insentif, progres, dan lain- lain. Budaya organisasi juga merupakan pola perilaku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.

Anggaran

Anggaran adalah rencana keuangan reguler yang didasarkan pada program yang disetujui. Anggaran adalah alat manajemen untuk mencapai tujuan. Anggaran didefinisikan sebagai “pendekatan formal dan sistematis untuk melaksanakan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengendalian”.

Anggaran adalah rencana keuangan rutin berdasarkan program yang telah disetujui. Anggaran adalah alat manajemen untuk mencapai tujuan. Menurut definisi anggaran, itu adalah : pendekatan formal dan sistematis untuk melaksanakan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengendalian (Meria Solina

2015).

Evaluasi Anggaran

Evaluasi anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian akuntabilitas departemen .

Evaluasi anggaran adalah proses yang digunakan untuk menilai akuntabilitas dan melacak penyimpangan anggaran dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya. Jika evaluasi bersifat menghukum, motivasi akan rendah; namun, jika evaluasi mendukung, perilaku positif akan dihasilkan dan akuntabilitas manajemen dapat meningkat.

Evaluasi menawarkan informasi yang tidak akurat dan dapat diandalkan tentang efektivitas kebijakan, termasuk sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah dipenuhi melalui tindakan pemerintah. Evaluasi ini menunjukkan seberapa jauh tujuan dan sasaran tertentu telah tercapai.

Proses evaluasi membantu untuk mendefinisikan dan menilai nilai-nilai yang memandu pilihan tujuan dan sasaran. Dengan menciptakan dan mencapai tujuan dan sasaran, nilai menjadi lebih jelas.

Penerapan evaluasi membantu teknik analisis kebijakan lainnya, seperti pemecahan masalah dan pemberian nasihat, menjadi lebih efektif. Isu-isu kebijakan mungkin perlu dirumuskan ulang mengingat informasi tentang akuntabilitas kebijakan yang tidak memadai.

Tujuan Evaluasi Anggaran

1. Evaluasi memberikan informasi yang tidak akurat dan tidak dapat diandalkan tentang kemandirian kebijakan, termasuk seberapa baik kebutuhan, nilai, dan peluang telah dipenuhi oleh tindakan legislatif. Dalam hal ini, evaluasi menunjukkan sejauh mana tujuan dan target tertentu telah tercapai.
2. Proses evaluasi membantu dalam mendefinisikan dan menilai nilai-nilai yang digunakan untuk memilih tujuan dan sasaran. Nilai menjadi lebih jelas ketika tujuan dan target ditetapkan dan dicapai.
3. Evaluasi memfasilitasi penggunaan metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi. Masalah kebijakan mungkin perlu dirumuskan kembali karena kurangnya informasi tentang akuntabilitas kebijakan.
4. Evaluasi anggaran memiliki verifikasi bahwa akuntabilitas aktual sesuai dengan akuntabilitas yang diantisipasi.
5. Evaluasi anggaran membuat penilaian akuntabilitas lebih sederhana dalam menilai akuntabilitas individu terhadap satu sama lain.
6. Sistem evaluasi terhadap akuntabilitas dapat meningkatkan peringatan, peringatan potensi masalah.
7. Evaluasi anggaran untuk mengevaluasi pengambilan keputusan manajemen

Fungsi Evaluasi Anggaran

1. Fungsi koordinasi

Menurut Fladimir Edwin Mbon (2014) Evaluasi anggaran berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan rencana dan inisiatif berbagai unit atau segmen dalam organisasi agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Karena setiap anggota organisasi memiliki kepentingan dan perspektif yang unik terhadap tujuan organisasi, koordinasi tidak dapat diasumsikan terjadi secara otomatis dan harus dicari secara aktif. proses mengkoordinasikan hubungan karyawan dengan subkontraktor mereka sehingga mereka bekerja sama untuk memajukan tujuan bisnis. Pekerjaan dibagi menjadi kelompok dan individu untuk kegiatan ini, dan hubungan antara kegiatan individu dan kelompok dikoordinasikan.

2. Kemampuan Untuk Berkomunikasi

Organisasi harus menetapkan saluran komunikasi antara dan di dalam berbagai unitnya jika ingin beroperasi secara efektif. Informasi tentang tujuan, strategi, kebijakan, rencana, implementasi, dan penyimpangan yang tidak terduga disampaikan melalui komunikasi. Tingkat dan unit organisasi yang berbeda berkomunikasi satu sama lain dan mengambil bagian dalam proses penganggaran selama tahap penyusunan. Selain itu, laporan kontrol produk harus digunakan untuk mengevaluasi pencapaian setiap orang yang bertanggung jawab atas anggaran.

3. Fungsi Motivasi

Anggaran juga berfungsi sebagai instrumen motivasi bagi pelaksana untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Pelaksana dapat didorong untuk bekerja lebih keras dengan menawarkan insentif berupa imbalan atas keberhasilan, seperti uang, penghargaan, dan penghargaan lainnya.

4. Tindakan Kontrol

Evaluasi anggaran dapat digunakan sebagai metode pengendalian kegiatan karena anggaran yang disetujui merupakan kesepakatan dari pelaksana dan membantu dalam penyusunan anggaran. Dengan rasio rencana dengan pelaksanaan aktual, pengendalian pada dasarnya menentukan apakah penyimpangan telah terjadi. Tindakan Kontrol bertindak sebagai dasar untuk tujuan evaluasi kinerja dan umpan balik. Perencanaan dan pengendalian adalah dua konsep yang harus dihubungkan karena sering digunakan secara bergantian. Jika ada kontrol yang tidak efektif, perencanaan tidak akan efektif dan waktu serta sumber daya akan terbuang sia-sia. Di sisi lain, persiapan diperlukan untuk menjamin bahwa kontrol diterapkan dengan cara yang menghasilkan hasil yang diinginkan.

5. Berfungsi Sebagai Pendidik

Selain itu, evaluasi anggaran adalah alat yang dapat digunakan manajer untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara beroperasi secara khusus di pusat tanggung jawab yang mereka awasi sembari membangun hubungan dengan pusat tanggung jawab lain dalam organisasi yang terkena dampak. Oleh karena itu, anggaran sangat membantu bagi para manajer atau calon manajer untuk mendapatkan pelatihan kepemimpinan sehingga mereka dapat mengisi posisi-posisi di masa depan yang lebih tinggi (Abbas, Salim.2007).

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode probability sampling, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap komponen (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 32 responden menjadi populasi sampel penelitian. Mereka diambil dari 32 pegawai di seluruh unit kerja di bawah walikota Medan yang ikut dalam penyusunan anggaran. Sampel jenuh, yang mencakup setiap anggota populasi, digunakan dalam metode pemilihan sampel. Fakta bahwa populasi tidak mencapai 100 populasi secara keseluruhan adalah penyebabnya. Peneliti langsung menyebarkan kuesioner kepada responden sebagai sarana pengumpulan data. Penelitian dilakukan di Kantor Wali kota Medan.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Dalam menyebarkan angket yang penulis lakukan terhadap 32 responden, Pelaksana anggaran yang akuntabel dapat ditelusuri dengan cara mengevaluasi penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun dan menentukan seberapa besar penyimpangan yang terjadi. Berikut adalah hasil tanggapan responden terhadap evaluasi anggaran kantor Walikota Medan :

Variabel Evaluasi Anggaran

Tabel 1. Tabulasi jawaban Responden terhadap variabel Evaluasi Anggaran

No. Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	12	36%	17	54%	3	10%	0	0%	32	100%
2	11	32%	12	40%	7	28%	0	0%	32	100%
3	9	29%	23	71%	0	0%	0	0%	32	100%
4	9	27%	14	43%	8	24%	1	6%	32	100%
5	11	35%	18	55%	3	10%	0	0%	32	100%

No. Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Jumlah	No. Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
6	10	33%	8	27%	8	26%	6	14%	32	100%
7	18	55%	14	45%	0	0%	0	0%	32	100%
8	14	45%	18	55%	0	0%	0	0%	32	100%
9	14	45%	16	50%	2	5%	0	0%	32	100%
10	15	46%	17	54%	0	0%	0	0%	32	100%
11	11	32%	12	40%	6	18%	3	10%	32	100%
12	12	37%	14	43%	5	15%	1	5%	32	100%
13	11	33%	9	27%	7	23%	5	17%	32	100%
14	18	55%	14	45%	0	0%	0	0%	32	100%

Persentase responden menyatakan setuju dengan pernyataan adanya evaluasi terhadap bagaimana program dan kegiatan dilaksanakan, serta bagaimana setiap orang memandang tanggung jawab dan kewajibannya adalah 54%.

1. Jawaban yang diberikan oleh responden mengenai ada atau tidaknya evaluasi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan responden menunjukkan persetujuan mereka dalam tanggapan mereka sebesar 40%.
2. Apakah mereka setuju atau tidak setuju bahwa SKPD yang memenuhi tujuan anggaran mereka menerima penghargaan setelah evaluasi kinerja, responden memberikan tanggapan positif sebesar 71 %.
3. Persentase responden setuju dengan pernyataan “Dengan anggaran saat ini, saya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan seperti yang saya harapkan” adalah 43%.
4. Tentang anggaran dan tujuan saya, responden setuju dengan persentase 55%.
5. Persentase responden yang sangat setuju dengan pernyataan “Saya sangat yakin dengan anggaran yang ada” dan “Saya dapat menyelesaikan tugas seperti yang saya harapkan” sebesar 33%.
6. Tanggapan dari responden mengenai apakah program dan kegiatan dievaluasi setelah dilaksanakan. Sebanyak 55 % responden menyatakan sangat setuju.
7. Persentase responden menyatakan setuju dengan adanya kajian ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sasaran sebesar 55%.
8. Jawaban atas pertanyaan apakah reward diberikan kepada SKPD yang memenuhi target anggarannya setelah dilakukan evaluasi kinerja diberikan oleh responden, dengan 50% responden setuju.

9. Persentase responden yang setuju dengan pernyataan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta persepsi seseorang terhadap tugas dan kewajibannya adalah 54%.
10. Jawaban dari responden mengenai ada atau tidaknya tinjauan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk menentukan apakah sejalan atau tidaknya dengan tujuan yang telah ditetapkan 40% responden menyatakan setuju.
11. Persentase responden setuju dengan pernyataan "Dengan anggaran yang ada, saya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan seperti yang saya harapkan" sebesar 43%.
12. Persentase responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan "Saya sangat yakin dengan anggaran yang ada dan saya dapat menyelesaikan tugas seperti yang saya harapkan" sebesar 33%.
13. Tanggapan dari responden mengenai adanya penilaian terhadap seberapa baik program dan kegiatan yang dilaksanakan. Di antara responden, 55% menyatakan sangat setuju.

Variabel Akuntabilitas

Tabel 2. Tabulasi Jawaban Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas

No. Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	8	26%	24	74%	0	0%	0	0%	32	100%
2	9	29%	23	71%	0	0%	0	0%	32	100%
3	8	24%	24	76%	0	0%	0	0%	32	100%
4	10	30%	22	70%	0	0%	0	0%	32	100%
5	13	40%	19	60%	0	0%	0	0%	32	100%
6	24	75%	8	25%	0	0%	0	0%	32	100%
7	9	27%	11	33%	7	22%	5	18%	32	100%

14. 74 % responden setuju dengan pernyataan bahwa ada hubungan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan serta bagaimana seseorang memandang tanggung jawab mereka.
15. Seluruh pejabat dan pimpinan perlu mengetahui tanggapan responden mengenai ketepatan sasaran anggaran suatu program. 71% responden mengatakan mereka setuju.
16. Rencana strategis organisasi perlu menjadi pertimbangan dalam menginterpretasikan tanggapan responden mengenai visi dan misi program. 76% responden mengatakan mereka setuju dalam tanggapan mereka.
17. 70 % responden setuju dengan pernyataan bahwa indikator kinerja harus dipilih untuk setiap kegiatan atau program.
18. 60 % responden setuju dengan pernyataan responden bahwa analisis keuangan harus dilakukan setelah setiap kegiatan atau program selesai.
19. 75 % responden sangat setuju dengan jawaban responden ketika ditanya tentang pemeriksaan operasional program.
20. 33 % responden setuju dengan pernyataan bahwa pelaksanaan kegiatan telah diatur dengan menggunakan ukuran atau indikator kinerja yang tepat untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan.

Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas

Langkah-langkah yang diambil untuk mengawasi perbedaan anggaran, melaporkannya ke departemen yang terkena dampak, dan kemudian menggunakan data tersebut untuk mengukur akuntabilitas mereka. Proses membandingkan input, output, dan hasil aktual dengan rencana dan standar melibatkan beberapa tugas terkait evaluasi. Hasil kegiatan pemantauan dianalisis selama proses evaluasi. Sebagai dasar untuk menentukan tingkat keberhasilan yang dicapai dan perlunya tindakan lebih lanjut, evaluasi juga menilai output dari sejumlah program.

Komponen evaluasi anggaran harus ditindak lanjuti agar dapat dilakukan secara prospektif terkait dengan temuan evaluasi dan tindak lanjut penggunaan anggaran yang dikelola pimpinan. Untuk meningkatkan akuntabilitas, temuan evaluasi juga harus menginformasikan alokasi anggaran, perimbangan anggaran, dan pemantauan subsidi anggaran yang berbeda.

Sistematika evaluasi anggaran merupakan acuan untuk menentukan akuntabilitas departemen dan digunakan untuk memeriksa anggaran ke departemen yang bertugas. Komponen evaluasi anggaran perlu dilaksanakan agar dapat dilakukan secara prospektif terhadap evaluasi dan tindak lanjut penggunaan anggaran yang dikelola oleh aparatur pemerintah. Hasil evaluasi seharusnya dapat memberikan deskripsi general tentang alokasi, perimbangan, dan berbagai cara pengendalian yang digunakan dalam anggaran pemerintah.

Evaluasi anggaran dimaksudkan untuk membantu organisasi pemerintah menjadi lebih akuntabel di masa depan. Diharapkan dengan melakukan ini, organisasi yang bersangkutan akan

mengetahui keberhasilan aktual, kemajuan, tantangan, dan faktor apa pun yang mencegahnya mencapai akuntabilitas dan menyelesaikan misi yang dimaksud. Tindakan yang diambil untuk memantau varians anggaran dan melaporkannya ke departemen yang tepat menjadi dasar untuk mengevaluasi akuntabilitas departemen. Membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan keluaran dilakukan melalui serangkaian tugas yang disebut sebagai evaluasi. Tolok ukur dan tujuan dibandingkan dengan hasilnya. Evaluasi adalah proses menilai hasil dari kegiatan pemantauan. Selain itu, evaluasi menilai hasil dari berbagai pengaplikasian anggaran untuk menentukan Keefektifan dan langkah berikutnya yang harus dilakukan.

Komponen evaluasi anggaran sangat relevan digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan hasil evaluasi di masa mendatang dan tindak lanjut bagaimana anggaran yang dikelola kepemimpinan digunakan. Selain itu, ringkasan alokasi anggaran, saldo anggaran, dan berbagai program pemantauan anggaran untuk subsidi pemerintah diantisipasi dari evaluasi anggaran.

Prosedur yang digunakan untuk menentukan akuntabilitas departemen untuk varians anggaran dan berfungsi sebagai pondasi untuk penilaian disebut evaluasi anggaran. Dalam pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut penggunaan anggaran yang dikelola oleh aparat pemerintah maka diperlukan pelaksanaan komponen evaluasi anggaran. Evaluasi tersebut harus dapat memberikan rincian tentang alokasi anggaran, perimbangan anggaran, dan berbagai teknik pengawasan anggaran.

Diharapkan organisasi pemerintah akan menjadi lebih akuntabel di masa depan sebagai hasil dari evaluasi anggaran. Evaluasi anggaran berfungsi untuk menginformasikan organisasi yang bersangkutan tentang pencapaian aktual, kemajuan, hambatan yang dihadapi, atau alasan tidak mencapai akuntabilitas untuk mencapai misi yang direncanakan.

V. Kesimpulan

Pembahasan dan temuan penelitian mendukung kesimpulan berikut: Akuntabilitas dipengaruhi oleh evaluasi anggaran. Tindakan yang diambil untuk melacak penyimpangan anggaran ke departemen terkait dan berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi akuntabilitas departemen. Akuntabilitas dan evaluasi anggaran saling terkait. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong berkembangnya akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk membangun pemerintahan yang baik dan handal. Pejabat pemerintah harus menyadari bahwa publik akan menganggap mereka bertanggung jawab atas hasil pekerjaan mereka.

Evaluasi menawarkan informasi yang tidak akurat dan dapat diandalkan tentang efektivitas kebijakan, termasuk sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah dipenuhi melalui tindakan pemerintah. Evaluasi ini menunjukkan seberapa jauh tujuan dan sasaran tertentu telah tercapai. Proses evaluasi membantu untuk mendefinisikan dan menilai nilai-nilai yang memandu pilihan tujuan dan sasaran. Dengan menciptakan dan mencapai tujuan dan sasaran, nilai menjadi lebih jelas.

Penerapan evaluasi membantu teknik analisis kebijakan lainnya, seperti pemecahan masalah dan pemberian nasihat, menjadi lebih efektif. Isu-isu kebijakan mungkin perlu dirumuskan ulang mengingat informasi tentang akuntabilitas kebijakan

yang tidak memadai.

VI. Daftar Pustaka

- Abbas, Salim. (2007). Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar (2022) Pengaruh Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau.
- Beny Arifin W. (2012) Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi dan Investasi.
- Fitri Hariani Ritonga (2018) pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas pada Kantor Walikota Medan.
- Fladimir Edwin Mbon (2014) Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Akuntabilitas Aparat Pemerintah Daerah Yogyakarta.
- Meria Solina (2015) Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Pada Skpd Kota Tanjungpinang.
- Rahmawati (2021) Pengaruh Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Studi pada BKAD Kabupaten Enrekang).
- Syahna Zatira (2019) Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas pada Pemerintah Kota Medan.